

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Letjend Soeprapto, Komplek Perkantoran PEMDA
Telp. (0528) 31327 Fax. (0528) 31471 Kode Pos. 73911

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 277 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang perlu menetapkan rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 belum sempurna, untuk itu di harapkan kritik dan sarannya agar masa mendatang dapat lebih disempurnakan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun – tahun berikutnya. Pada akhirnya semoga Rencana Kerja 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

Puruk Cahu, Januari 2024

PK. KEPALA DINAS,



REYZAL SAMAT, S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720724 200003 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud	4
1.3.2. Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	17
3.1. Tujuan dan Sasaran	17
3.1.1. Tujuan	17
3.1.2. Sasaran	17
3.2. Program dan Kegiatan	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	22
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD berkoordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDALITBANG dan pemangku kepentingan. Renja disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- d. perumusan rancangan akhir; dan
- e. penetapan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 ini disusun secara bersinergi dan terintegrasi antara prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.

Berlatar belakang amanat dimaksud, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Tugas Pembantuan lainnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, akan melaksanakan segenap proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya dalam upaya mewujudkan peningkatan produksi di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Murung Raya baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya dengan harga yang terjangkau.

Mengingat begitu strategisnya peranan Dinas Pertanian dan Perikanan serta seiring untuk mewujudkan Visi Kabupaten Murung Raya seperti yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2008-2028 yaitu “**Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**”. Maka perlu disusun rencana satu tahun yang komprehensif dan fleksibel dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan disusun dengan berbagai pendekatan, antara lain :

1. **Pendekatan Teknokratis (Strategis Dan Berbasis Kinerja)**, perencanaan diawali dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kinerja pembangunan 5 (Lima) tahun terakhir dan identifikasi kondisi saat ini maupun 5 (Lima) tahun ke depan, baik mengenai sumber daya internal maupun lingkungan eksternal serta permasalahannya. Kondisi tersebut kemudian dianalisis sehingga diketahui kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities) dan tantangan (threats). Berdasarkan analisis tersebut dapat dirumuskan kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. **Pendekatan Demokratis dan Partisipatif**, perencanaan melibatkan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan disetiap tahapan penyusunan renstra, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan menghasilkan konsensus atau kesepakatan terhadap perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, kebijakan dan strategis serta prioritas program dan kegiatan.
3. **Pendekatan Top Down**, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga terjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.
4. **Pendekatan Bottom Up**, perencanaan dilaksanakan dengan menampung aspirasi dari masyarakat secara partisipatif kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga terjamin terciptanya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembuatan Rencana Kerja SKPD ini telah disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RPD tersebut, untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya; dan
29. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025 serta merupakan tindak lanjut dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Murung Raya.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

1. Acuan Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Murung Raya;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan selama Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 ini sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA

Sebagaimana amanat dalam Pasal 128 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah harus memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dipertegas dalam penjelasan yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan dimaksud menegaskan Kembali bahwa pada sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya memuat review RENJA Tahun 2023. Sebagaimana terlihat pada lampiran Tabel 2.1 untuk selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan realisasi program dan kegiatan :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Tingkat Capaian RENSTRA/RPJMD
Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4	5	6		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%				
	Belanja Tidak Langsung (BTL) :			6.901.663.822,00		20.224.476.834,00		293,04			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	6.901.663.822,00	90,00	Persen	20.224.476.834,00	90,00	Persen	293,04

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
1	4	5	6			14 = 7 + 13			15 = 14 / 6 x 100%		
			K	Persen	Rp	K	Persen	Rp	K	Persen	Rp
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	6.901.663.822,00	90,00	Persen	20.224.476.834,00	90,00	Persen	293,04
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60,00	Orang/Bulan	6.629.623.822,00	60,00	Orang/Bulan	19.312.956.834,00	60,00	Orang/Bulan	291,31
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	Laporan	272.040.000,00	12,00	Laporan	911.520.000,00	12,00	Laporan	335,07
	Belanja Langsung :				12.543.918.228,00			89.830.742.381,00			716,13
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	4.478.811.717,00	90,00	Persen	15.024.941.277,00	90,00	Persen	335,47
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	0,00	90,00	Persen	80.651.250,00	90,00	Persen	#DIV/0!
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	Dok	0,00	2,00	Dok	39.900.000,00	2,00	Dok	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00	Dok	0,00	2,00	Dok	40.751.250,00	2,00	Dok	#DIV/0!
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	130.368.000,00	90,00	Persen	121.414.235,00	90,00	Persen	93,13

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
1	4	5	6			14 = 7 + 13			15 = 14 / 6 x 100%		
			K	Orang	Rp	K	Orang	Rp	K	Orang	Rp
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14,00	Orang	130.368.000,00	14,00	Orang	121.414.235,00	14,00	Orang	93,13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	623.123.717,00	90,00	Persen	3.915.238.491,00	90,00	Persen	628,32
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8,00	Paket	154.000.000,00	8,00	Paket	516.872.837,00	8,00	Paket	335,63
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8,00	Paket	66.463.000,00	8,00	Paket	235.583.837,00	8,00	Paket	354,46
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Laporan	30.000.000,00	12,00	Laporan	111.074.000,00	12,00	Laporan	370,25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,00	Laporan	372.660.717,00	24,00	Laporan	1.632.477.037,00	24,00	Laporan	438,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15,00	Paket	0,00	15,00	Paket	1.419.230.780,00	15,00	Paket	#DIV/0!
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	661.000.000,00	90,00	Persen	2.257.397.378,00	90,00	Persen	341,51
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam 1 (tahun)	10,00	Unit	661.000.000,00	10,00	Unit	2.257.397.378,00	10,00	Unit	341,51

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
			6						14 = 7 + 13		
1	4	5	K		Rp	K		Rp	K		Rp
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	2.892.320.000,00	90,00	Persen	8.190.890.573,00	90,00	Persen	283,19
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	Laporan	50.000.000,00	12,00	Laporan	180.592.000,00	12,00	Laporan	361,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	125.000.000,00	12,00	Laporan	243.186.277,00	12,00	Laporan	194,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	2.717.320.000,00	12,00	Laporan	7.767.112.296,00	12,00	Laporan	285,84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	164.000.000,00	90,00	Persen	402.704.700,00	90,00	Persen	245,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan pajaknya	50,00	Unit	164.000.000,00	50,00	Unit	402.704.700,00	50,00	Unit	245,55
	Penataan Organisasi	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	8.000.000,00	90,00	Persen	56.644.650,00	90,00	Persen	708,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan Kinerja OPD	1,00	Dok	8.000.000,00	1,00	Dok	56.644.650,00	1,00	Dok	708,06
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	87.975,00	Ton	60.000.000,00	87.975,00	Ton	173.543.300,00	87.975,00	Ton	289,24
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	87.975,00	Ton	60.000.000,00	87.975,00	Ton	173.543.300,00	87.975,00	Ton	289,24

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4	5	6		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%				
	Kabupaten/Kota										
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12,00	Dok	60.000.000,00	12,00	Dok	173.543.300,00	12,00	Dok	289,24
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	87.975,00	Ton	1.230.000.000,00	87.975,00	Ton	3.393.524.881,00	87.975,00	Ton	275,90
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	87.975,00	Ton	1.230.000.000,00	87.975,00	Ton	3.393.524.881,00	87.975,00	Ton	275,90
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1,00	Dok	0,00	1,00	Dok	0,00	1,00	Dok	0,00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,00	Unit	0,00	10,00	Unit	0,00	10,00	Unit	0,00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,00	Unit	550.000.000,00	10,00	Unit	1.138.278.400,00	10,00	Unit	206,96
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan	12,00	Dok	80.000.000,00	12,00	Dok	303.478.100,00	12,00	Dok	379,35

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
			6		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%				
1	4	5	K		Rp	K		Rp	K		Rp
	Daerah Kabupaten/Kota	Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan									
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	3,00	Ha	600.000.000,00	3,00	Ha	1.923.862.381,00	3,00	Ha	320,64
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olah Hasil Perikanan	26,99	Ton	50.000.000,00	26,99	Ton	9.150.758.467,00	26,99	Ton	183,02
	Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Olah Hasil Perikanan	26,99	Ton	50.000.000,00	26,99	Ton	9.150.758.467,00	26,99	Ton	183,02
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270,00	Ton	50.000.000,00	270,00	Ton	9.150.758.467,00	270,00	Ton	183,02
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar/Tahun	90,00	Persen	1.375.000.000,00	90,00	Persen	54.053.080.265,00	90,00	Persen	39,31
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar/Tahun	90,00	Persen	800.000.000,00	90,00	Persen	30.450.258.379,00	90,00	Persen	38,06
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12,00	Laporan	800.000.000,00	12,00	Laporan	30.450.258.379,00	12,00	Laporan	38,06
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya	Produktivitas Pertanian Per	90,00	Persen	575.000.000,00	90,00	Persen	23.602.821.886,00	90,00	Persen	41,05

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			
1	4	5	6		14 = 7 + 13			15 = 14 / 6 x 100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hektar/Tahun									
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	40,00	Ekor	575.000.000,00	40,00	Ekor	23.602.821.886,00	40,00	Ekor	41,05
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	80,00	Persen	2.422.106.511,00	80,00	Persen	8.981.110.527,00	80,00	Persen	370,80
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	80,00	Persen	1.279.506.511,00	80,00	Persen	1.907.020.680,00	80,00	Persen	149,04
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	12,00	Dok	1.279.506.511,00	12,00	Dok	1.907.020.680,00	12,00	Dok	149,04
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	80,00	Persen	116.600.000,00	80,00	Persen	1862457037,00	80,00	Persen	15,97
	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	116.600.000,00	-	-	1.862.457.037,00	-	-	15,97
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	80,00	Persen	765.000.000,00	80,00	Persen	3.312.706.295,00	80,00	Persen	433,03
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	12,00	Laporan	765.000.000,00	12,00	Laporan	3.312.706.295,00	12,00	Laporan	433,03

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)	
			6		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%					
1	4	5	K		Rp		K		Rp		K	Rp
	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	80,00	Persen	261.000.000,00	80,00	Persen	1.898.926.515,00	80,00	Persen	727,56	
	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola	5,00	Ha	261.000.000,00	5,00	Ha	1.898.926.515,00	5,00	Ha	727,56	
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	90,00	Persen	200.000.000,00	90,00	Persen	1.067.108.278,00	90,00	Persen	533,55	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	90,00	Persen	200.000.000,00	90,00	Persen	1.067.108.278,00	90,00	Persen	533,55	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,00	Laporan	200.000.000,00	4,00	Laporan	1.067.108.278,00	4,00	Laporan	533,55	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	1,00	Dok	0,00	1,00	Dok	0,00	1,00	Dok	0,00	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	Dok	0,00	1,00	Dok	0,00	1,00	Dok	0,00	
9.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Pertanian	90,00	Persen	1.600.000.000,00	90,00	Persen	15.870.656.468,00	90,00	Persen	991,92	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		
			6			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		
1	4	5	K		Rp	K		Rp	K		Rp
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Pertanian	90,00	Persen	1.600.000.000,00	90,00	Persen	15.870.656.468,00	90,00	Persen	991,92
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	30,00	Ha	1.000.000.000,00	30,00	Ha	8.439.945.068,00	30,00	Ha	843,99
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4,00	Ha	600.000.000,00	4,00	Ha	7.430.711.400,00	4,00	Ha	1238,45
10	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	85,00	Persen	1.128.000.000,00	85,00	Persen	2.476.767.342,00	85,00	Persen	219,57
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	85,00	Persen	1.128.000.000,00	85,00	Persen	2.476.767.342,00	85,00	Persen	219,57
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25,00	Unit	703.000.000,00	25,00	Unit	1.196.850.508,00	25,00	Unit	170,25
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15,00	Persen	425.000.000,00	15,00	Persen	1.038.851.541,00	15,00	Persen	244,44
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2,00	Unit	0,00	2,00	Unit	241.065.293,00	2,00	Unit	#DIV/0!
Rata-rata capaian kinerja (%)											353,18
Predikat kinerja											Sangat Baik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dapat dilihat melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi Sektor Pertanian (Ton) :							
	- Padi	6.832,00	3.428,00	6.897,50	7.007,40	4.156,82	10.187,00*	7.120,00*
	- Jagung	133,00	447,00	266,00	411,00	2.486,00	216,00*	385,00
	- Ubi Kayu	423,00	535,00	642,00	837,00	957,00	271,00*	271,00
2.	Produksi Sektor Perkebunan (Ton) :							
	- Karet	55,00	61,00	55,00	32,00	17,40	22,50	11,77
	- Kopi	35,00	33,00	35,00	48,00	39,00	40,00	21,10
	- Kakao	3,10	3,10	3,20	3,40	3,90	3,50	11,30
3.	Produksi Sektor Peternakan (Ton) :							
	- Daging Sapi	250,00	150,00	154,00	155,00	128,00	103,00	137,30
	- Daging Ayam	904,00	1.278,00	1.246,00	1.343,00	1.401,00	1.542,00	1.411,70
	- Telur	102,00	107,00	128,00	96,00	386,00	241,00	468,80
4.	Kasus Penyakit Hewan (Kasus) :							
	- Avian Influenza (AI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Penyakit Jembrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rabies	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	- Flu Babi	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	4,00	0,00
	- Penyakit Mulut &Kuku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	Jumlah Kasus	1,00	1,00	2,00	1,00	154,00	6,00	0,00
5.	Produksi Sektor Perikanan (Ton) :							
	- Perikanan Budidaya	1.245,00	1.413	1.311	2.463	3.027	3.399	3.217,00
	- Perikanan Tangkap	210,72	214,48	208,65	211,43	285,60	405	256,80
6.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%) :							
	- Cakupan Bina Kelompok Tani	56,00	60,00	64,00	68,00	70,00	72,00	72,00

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Terkait Kesekretariatan.

- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
- Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;
- Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Masih kurangnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan dan aset maupun pelaksana di lapangan;
- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.

b. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Bina Usaha Tani dan Penyuluhan serta Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tujuan umum pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, serta perikanan adalah peningkatan dan pemerataan dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani/pembudidaya. Berikut merupakan permasalahan yang ada dalam mewujudkan itu semua :

- Masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap produksi pangan dari luar. Masalah pokok ini disebabkan oleh :
 - Produksi hasil pertanian yang belum mampu mencukupi kebutuhan daerah;
 - Lahan pertanian kering dan kurang subur untuk dikelola kembali;
 - Belum optimalnya penguasaan teknologi dalam pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - Kebakaran hutan dan lahan pertanian.
- Belum optimalnya penanganan kasus penyakit hewan ternak. Masalah Pokok ini disebabkan oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana penanganan kasus penyakit hewan ternak.
- Masih rendahnya minat usaha tani dalam arti luas. Masalah Pokok ini disebabkan oleh :
 - Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian;
 - Semakin berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian dan rendahnya minat generasi muda bekerja di bidang pertanian.
- Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap produksi ikan dari luar. Masalah Pokok ini disebabkan oleh :
 - Menurunnya populasi ikan pada sungai dan danau;
 - Belum optimalnya pengelolaan ikan budidaya;
 - Kegiatan Pengolahan produk Ikan dalam daerah masih dalam skala rumah tangga.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya adalah “Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing Bertumpu pada Sektor Unggulan Daerah”.

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan. Sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya adalah “Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 – 2026

No.	Urusan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Target Akhir Renstra
					2024	2025	2026	
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Pembangunan ekonomi berdaya saing bertumpu pada sektor unggulan daerah	Meningkatnya perputaran sektor unggulan dalam pembangunan	Produksi Pertanian (ton/kg)				
				- Padi /ton				
				a. Sawah	167,60	167,60	167,60	167,60
				b. Ladang	9.841,20	9.888,40	9.937,96	9.937,96
				- Jagung /ton	812,46	882,60	946,89	946,89
				- Ubi Kayu /ton	1.038,20	1.038,20	1.038,20	1.038,20
				- Buah Sayuran Tahunan (BST) /kwintal	28.307,65	28.307,65	28.307,65	28.307,65
				- Sayuran Buah Semusim (SBS) /ton	1.865,03	1.865,03	1.865,03	1.865,03
				- Tanaman Biofarmaka (TBF) /kg	7.170,10	7.170,10	7.170,10	7.170,10
				Produksi Perkebunan (ton)				
				- Karet	13.427,83	13.461,39	13.495,05	13.495,05
				- Kopi	40,61	40,71	40,80	40,80
				- Kakao	11,34	11,36	11,39	11,39
				- Sawit	190,31	190,78	191,25	191,25
				- Nilam	45,50	45,75	46,00	46,00
				- Kelor	0,2500	0,2506	0,2512	0,2512
				Produksi Peternakan (ton)				
				Daging	268,09	281,88	296,40	296,40
				- Sapi	224,69	235,92	247,72	247,72
				- Kerbau	1,45	1,54	1,63	1,63
				- Kambing	4,28	4,49	4,72	4,72
				- Babi	37,67	39,93	42,33	42,33
				Daging Unggas	2.205,17	2.272,07	2.341,05	2.341,05
- Ayam Buras	27,29	28,65	30,09	30,09				

No.	Urusan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			Target Akhir Renstra
					2024	2025	2026	
				- Ayam Ras Petelur	3,03	3,18	3,34	3,34
				- Ayam Ras Pedaging	2.169,62	2.234,70	2.301,74	2.301,74
				- Itik	5,23	5,54	5,88	5,88
				Telur	341,25	358,31	376,23	376,23
				- Ayam Buras	134,15	140,86	147,90	147,90
				- Ayam Ras Petelur	149,09	156,54	164,37	164,37
				- Itik	58,01	60,91	63,96	63,96
				Peningkatan Lahan Pertanian /Hektar	4.626,00	4.718,00	4.812,00	4.812,00
				Presentase Penanganan Penyakit Hewan Menular	100,00	100,00	100,00	100,00
				Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	71,00	72,00	73,00	73,00
				Jumlah Petani Millenial (Orang)	2,00	2,00	2,00	6,00
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Akses Konsumsi Ikan	Meningkatnya Perputaran Sektor Perikanan	Produksi Perikanan (ton)				
				- Tangkap	290,00	305,00	334,00	311,00
				- Budidaya	3.353,00	3.483,00	3.515,00	3.515,00
				Produk Olahan Hasil Perikanan (kg)	1.655,00	1.689,00	1.722,00	1.722,00
				Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Daerah (kg/kapita)	58,21	59,38	60,56	60,56
3.	Non-Urusan			Capaian Nilai LAKIP (%)	96,00	97,00	98,00	98,00

3.2. Program dan Kegiatan

Adapun ikhtisar yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya pada tahun 2025 yang memuat program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran RPJPD, adalah sebagai berikut :

A. NON URUSAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi.
- b. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B.
 - Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak.
- d. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan lahan penggembalaan umum.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

5. Program Penyuluhan Pertanian

- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
 - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
 - Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
 - Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani kab/kota

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.
- 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
- a. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

3.3. Program dan Kegiatan Unggulan

A. PROGRAM PENANGANAN INFLASI

1. DEMPLOT KANDANG PENYANGGA AYAM PEDAGING DAN AYAM PETELUR

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- b. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.

2. GERAKAN TANAM CABE

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

B. PROGRAM PENANGANAN STUNTING

1. BUDIDAYA TANAMAN KELOR

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

2. PROMOSI KONSUMSI IKAN

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

C. PROGRAM KETAHANAN PANGAN

1. PERLUASAN TANAM PADI

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

2. PENGEMBANGAN JAGUNG

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

3. PENGEMBANGAN SUKUN**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

D. PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT**1. PENGEMBANGAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT****Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Artinya Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 yang terdiri dari Program Pembangunan yang direncanakan sebanyak 9 program dan 18 Kegiatan dengan 36 Sub kegiatan. Dari 36 sub kegiatan yang tersedia, semua memiliki pagu indikatif. Ada pun rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
	NON URUSAN							
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian akuntabilitas kinerja	94	13.779.897.981	96	16.864.966.997	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian serapan anggaran	97	150.000.000	98	250.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	100.000.000	6	150.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	50.000.000	12	100.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah temuan BPK	2	7.762.035.565	1	8.046.912.045	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	7.337.653.165	61	7.537.653.165	DISTANIK	Kab. Murung Raya

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPD	12	424.382.400	12	509.258.880	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaporan LHKPN, LHKASN, SPT Tahunan, dan SKP	100	203.374.080	100	390.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	14	203.374.080	14	390.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100	2.372.242.280	100	4.606.160.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	1.500.000.000	15	3.200.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	221.760.000	8	400.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	103.682.280	8	200.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	46.800.000	12	56.160.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	500.000.000	100	750.000.000	DISTANIK	Seluruh Wilayah NKRI
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.942.246.056	100	3.107.846.056	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	78.000.000	12	93.600.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	300.000.000	12	450.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.564.246.056	12	2.564.246.056	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	350.000.000	100	464.048.896	DISTANIK	Kab. Murung Raya

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50	350.000.000	50	464.048.896	DISTANIK	Kab. Murung Raya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		0	-	0	-	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	jumlah produksi Pertanian	80	3.240.000.000	85	6.070.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas lahan pertanian yang memperoleh sarana yang disediakan	100	1.020.000.000	100	2.400.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	1.020.000.000	12	2.400.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya jumlah populasi hewan ternak dan peternak/pelaku usaha peternakan	80	2.220.000.000	85	3.670.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	40	2.220.000.000	40	3.670.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
	Pengembangan budidaya sarang burung walet		1	1.000.000.000	1	2.000.000.000		
	Pengendalian Inflasi (Ayam Pedaging)		1	500.000.000	1	750.000.000		
	Pengendalian Inflasi (Ayam Petelur)		1	720.000.000	1	920.000.000		
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase meningkatnya luas lahan pertanian menetap	22	4.414.860.000	23	8.019.020.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan lahan pertanian menetap	360	2.920.000.000	432	4.460.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	12	2.640.000.000	12	4.180.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
	Ketahanan Pangan (Perluasan Tanam Padi)		7	1.200.000.000	7	1.600.000.000		
	Pengendalian Inflasi (Gerakan Tanam Cabe)		2	280.000.000	2	480.000.000		
	Ketahanan Pangan (Pengembangan Jagung)		100	800.000.000	100	1.200.000.000		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
	Ketahanan Pangan (Pengembangan Sukun)		100	360.000.000	100	700.000.000		
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	5	280.000.000	5	480.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
	Pengembangan Sentra Buah-buahan Lokal di Desa Olung Siron		1	280.000.000	1	480.000.000		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung BPP	100	159.020.000	100	359.020.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh diKecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	159.020.000	3	359.020.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	960.000.000	100	2.500.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	200	960.000.000	250	2.500.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
	Pengendalian Inflasi (Ayam Pedaging)		1	500.000.000	1	1.500.000.000		
	Pengendalian Inflasi (Ayam Petelur)		1	460.000.000	1	1.000.000.000		
3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Pelaksanaan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	100	375.840.000	100	700.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.03.2.04.02	Pengelolaan lahan pengembalaan umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola	5	375.840.000	5	700.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80	300.000.000	75	400.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	100	300.000.000	100	400.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
3.27.04.2.01.02	Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	300.000.000	4	400.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.05	Program Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian	Menurunnya luasan wilayah yang terkena bencana pertanian	90	2.500.000.000	90	3.500.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase penurunan areal terdampak perubahan iklim dan kebakaran lahan	10	2.500.000.000	10	3.500.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.05.2.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	80	1.500.000.000	70	2.000.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
	Penanganan Stunting (Budidaya Tanaman Kelor)		100	1.300.000.000	100	2.000.000.000		
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
	Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat		100	1.000.000.000	100	1.300.000.000		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya jumlah kemampuan kelas kelompok tani	40	2.530.640.000	50	4.553.732.224	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	40	2.530.640.000	50	4.553.732.224	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.07.2.01.01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40	900.000.000	50	1.300.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.27.07.2.01.02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40	350.000.000	50	703.732.224	DISTANIK	Kab. Murung Raya
	Petani Millenial		5	350.000.000	5	703.732.224		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2	80.640.000	2	150.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani kab/kota							
	Penanganan Stunting (Budidaya Kelor)	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk	20	1.200.000.000	20	2.400.000.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	311	86.400.000	334	103.680.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
3.25.03.2.01	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	100	86.400.000	100	103.680.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12	86.400.000	12	103.680.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	59,38	3.691.121.240	60,56	4.159.520.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi	70	3.691.121.240	75	4.159.520.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	93.600.000	12	112.320.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	156.000.000	1	187.200.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	2.274.721.240	10	2.300.000.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	
	Penanganan Stunting (Promosi Konsumsi Ikan)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21	2.274.721.240	21	2.300.000.000	DISTANIK Kab. Murung Raya	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12	124.800.000	12	200.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	3	730.000.000	3	860.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	10	312.000.000	10	500.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	1689	78.000.000	1722	150.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	100	78.000.000	100	150.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
3.25.06.2.03.01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4870	78.000.000	5515	150.000.000	DISTANIK	Kab. Murung Raya
TOTAL				30.620.919.221		43.820.919.221		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan terlebih lagi.

Selanjutnya dalam konteks keberlanjutan ekonomi di suatu daerah “secara sederhana” dapat diwujudkan melalui optimalisasi investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan ekspor-impor. Signifikannya grafik pertumbuhan ekonomi nasional merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dan mengoptimalkan belanja pemerintah karena 3 (tiga) indikator lainnya; investasi, konsumsi masyarakat dan ekspor-impor terus menunjukkan peningkatan. Selain untuk makin memacu perekonomian daerah optimalisasi belanja pemerintah juga merupakan langkah untuk memaksimalkan program unggulan daerah berupa penanganan stunting, penanganan dampak inflasi, dan ketahanan pangan. Kegiatan-kegiatan strategis yang di stimuluskan dalam Renja ini merupakan salah satu optimalisasi belanja pemerintah dimaksud dan semoga angka-angka ini dapat bertahan dan terealisasi kedepannya.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 ini kami susun dengan harapan dapat diwujudkan melalui dokumen-dokumen penganggaran selanjutnya. Terimakasih.

Puruk Cahu, Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS,

